



## Meningkatnya Kasus Narkoba Di Perkotaan: Tantangan Penegakan Hukum Dan Strategi Pencegahan

Rangga Prayitno<sup>1</sup>, Rifka Zuwanda<sup>2</sup>

<sup>1),2)</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author:* [rangaprayitno0@gmail.com](mailto:rangaprayitno0@gmail.com)

### ABSTRAK

Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Padang menunjukkan bahwa ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini telah menjadi salah satu wilayah rawan narkoba di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan kasus narkoba di Kota Padang, termasuk data statistik, jenis narkoba yang dominan, profil pelaku, serta wilayah-wilayah rawan. Selain itu, artikel ini juga menganalisis faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi peningkatan kasus, seperti lemahnya pengawasan di titik-titik strategis, kurangnya edukasi masyarakat, dan tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi generasi muda. Dampak sosial dan ekonomi dari fenomena ini dirinci secara mendalam, disertai dengan tinjauan terhadap upaya penegakan hukum dan langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta peran masyarakat. Penanggulangan narkoba di Kota Padang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antar semua elemen masyarakat.

**Kata Kunci:** Narkoba, Kota Padang, Penegakan Hukum, Pencegahan, Rehabilitasi

### ABSTRACT

The rise in drug abuse and trafficking cases in Padang City indicates that the capital of West Sumatra Province has become one of the drug-prone areas in Indonesia. This article aims to explain the development of drug-related cases in Padang, including statistical data, dominant types of drugs, offender profiles, and vulnerable areas. It also analyzes the underlying causes behind the increase in cases, such as weak supervision at strategic points, lack of public education, and socio-economic pressures faced by urban youth. The social and economic impacts of this phenomenon are described in detail, accompanied by a review of law enforcement efforts and preventive measures undertaken by the government, law enforcement agencies, and the role of civil society. Combating drugs in Padang requires a comprehensive and collaborative approach among all sectors of society.

**Keywords:** Drugs, Padang City, Law Enforcement, Prevention, Rehabilitation

## PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 4,8 juta pengguna narkoba di Indonesia dengan prevalensi tertinggi di wilayah perkotaan (BNN, 2023: 14). Kota-kota besar menjadi sasaran empuk bagi sindikat narkoba karena tingginya mobilitas penduduk, akses teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi yang dialami warganya. Situasi ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai tempat transit, tetapi juga pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Salah satu daerah yang kini mulai menunjukkan lonjakan signifikan dalam kasus narkoba adalah Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Padang yang dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi wilayah barat Sumatera kini menghadapi tantangan serius dalam hal penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Polresta Padang, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 200 kasus narkoba, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya ( Polresta Padang, 2023: 3). Lonjakan ini menunjukkan bahwa Padang tidak lagi sekadar jalur lintasan peredaran, tetapi telah menjadi pasar konsumsi narkoba itu sendiri.

Fenomena ini menjadi ironi tersendiri mengingat Sumatera Barat selama ini dikenal kuat dengan nilai-nilai adat dan agama yang konservatif. Nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" tampaknya mulai tergerus oleh pengaruh gaya hidup modern yang terbuka terhadap pengaruh eksternal (Nasution, 2019: 112). Kota Padang sebagai episentrum budaya dan peradaban Minangkabau kini sedang diuji oleh ancaman narkoba yang tidak memandang usia, status sosial, ataupun latar belakang pendidikan.

Perhatian serius terhadap situasi ini menjadi semakin mendesak karena penyalahgunaan narkoba di Padang didominasi oleh kalangan usia produktif, terutama remaja dan mahasiswa. Berdasarkan survei BNN Provinsi Sumatera Barat, pengguna narkoba terbanyak berasal dari rentang usia 17–30 tahun, dengan dominasi laki-laki dan status sosial pelajar atau mahasiswa (BNN Sumbar, 2023: 9). Ini menjadi sinyal bahaya bagi masa depan sumber daya manusia daerah. Tidak hanya berisiko merusak fisik dan mental generasi muda, narkoba juga berpotensi mendorong terjadinya tindak kriminalitas yang lebih luas, seperti pencurian, perampokan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan minimnya akses terhadap layanan konseling memperparah persoalan ini. Banyak pengguna yang akhirnya dipidana tanpa mendapatkan

penanganan yang menyeluruh untuk mengatasi ketergantungannya. Padahal, pendekatan hukum yang semata-mata represif tanpa disertai upaya preventif dan rehabilitatif justru cenderung melanggengkan siklus penyalahgunaan (Nugroho, 2022: 150).

Kondisi geografis Padang yang terbuka terhadap akses darat, laut, dan udara turut memudahkan pergerakan sindikat narkoba antarprovinsi. Jalur pelabuhan Teluk Bayur dan jalur lintas barat Sumatera kerap menjadi rute masuknya narkoba dari luar daerah, terutama dari wilayah Sumatera Utara dan Riau (LKKI, 2023: 24). Penegakan hukum yang belum maksimal di titik-titik masuk ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba.

Pentingnya perhatian serius terhadap maraknya kasus narkoba di Padang juga terletak pada dampaknya yang bersifat multidimensi. Tidak hanya merusak aspek kesehatan masyarakat, narkoba juga melemahkan produktivitas ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum jika tidak ditangani secara transparan dan tegas. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan narkoba di Kota Padang harus menjadi agenda prioritas lintas sektor.

Dengan memahami kompleksitas persoalan dan akar penyebabnya, maka perlu adanya pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat: dari pemerintah daerah, penegak hukum, institusi pendidikan, hingga keluarga. Penanganan narkoba bukan hanya urusan aparat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga Kota Padang agar tidak menjadi pusat darurat narkoba baru di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena maraknya kasus narkoba di Kota Padang secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba, serta upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menanggulangnya.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih fleksibel melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap dinamika sosial yang terjadi. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas yang berkembang di masyarakat terkait masalah narkoba di lingkungan perkotaan, khususnya di Kota Padang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu: (1) studi pustaka, untuk memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, laporan resmi dari BNN, Polresta Padang, dan pemerintah daerah; (2) wawancara semi-struktur terhadap informan kunci seperti aparat penegak hukum, petugas BNN Provinsi Sumatera Barat, tokoh masyarakat, serta mantan pengguna narkoba; dan (3) observasi lapangan, yaitu dengan mengamati secara langsung lingkungan yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba di beberapa kecamatan di Kota Padang.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan narkoba, baik sebagai pelaku kebijakan, pengamat, maupun individu yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ragam perspektif dan informasi yang representatif.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yakni dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen. Proses analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari identifikasi pola-pola yang muncul di lapangan hingga disusun menjadi kesimpulan yang relevan terhadap fokus penelitian.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, dilakukan *member check* dengan beberapa informan untuk mengonfirmasi kembali interpretasi peneliti terhadap data yang diberikan.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan analitis tentang situasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang serta menilai efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan, guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Data dan Fakta Kasus Narkoba di Kota Padang

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, tercatat sebanyak 243 kasus narkoba ditangani aparat penegak hukum di Kota Padang sepanjang tahun 2023, dengan

jumlah tersangka mencapai 338 orang (BNNP Sumbar, 2023: 6). Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 186 kasus dengan 265 tersangka. Lonjakan ini mengindikasikan semakin meluasnya jaringan dan konsumsi narkoba di wilayah perkotaan, khususnya Padang.

Dari jenis narkoba yang disita oleh aparat selama proses penindakan, sabu-sabu menjadi jenis narkoba yang paling dominan ditemukan, baik dalam bentuk paket kecil siap edar maupun dalam jumlah besar yang diduga berasal dari luar provinsi. Disusul oleh ganja yang banyak masuk melalui jalur darat dari Sumatera Utara, serta beberapa temuan ekstasi yang umumnya beredar di kalangan remaja dan lingkungan hiburan malam (Polresta Padang, 2023: 4). Data ini memperlihatkan bahwa Kota Padang tidak hanya menjadi jalur perlintasan, melainkan juga pasar konsumsi dengan ragam jenis narkoba.

Profil pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Padang juga memperlihatkan pola yang khas. Mayoritas tersangka adalah laki-laki, dengan rentang usia terbanyak antara 18–35 tahun, yang dikategorikan sebagai usia produktif. Menurut laporan BNNP Sumbar, sebanyak 71% dari total pelaku merupakan pemuda dan mahasiswa, dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah (BNNP Sumbar, 2023: 8). Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan daerah justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa beberapa pelaku bukan hanya pengguna, tetapi juga berperan sebagai kurir atau pengedar, yang direkrut oleh jaringan distribusi narkoba dengan iming-iming imbalan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak tersangka ditangkap dengan barang bukti yang cukup besar, melebihi ambang batas pengguna pribadi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LKKI, 2023: 21). Peran ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam praktik ilegal ini.

Secara geografis, wilayah dengan intensitas kasus tertinggi berada di Kecamatan Kuranji, Padang Utara, dan Lubuk Begalung. Ketiga kecamatan ini disebut oleh aparat sebagai wilayah rawan peredaran narkoba, baik karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi maupun akses transportasi yang terbuka (Polresta Padang, 2023: 5). Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa transaksi narkoba dilakukan secara daring (online), dengan sistem

pembayaran digital dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Modus semacam ini menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan cepat dan efisien.

Tren peningkatan kasus narkoba di Padang dalam tiga tahun terakhir juga memperlihatkan pola yang konsisten. Data tahunan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata sebesar 18–22% kasus setiap tahunnya sejak tahun 2021 (BNN, 2023: 15). Peningkatan ini tidak hanya dalam jumlah kasus, tetapi juga pada volume barang bukti yang diamankan dan kompleksitas jaringan yang terungkap. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan adanya keterlibatan antarprovinsi yang melibatkan jaringan Sumatera-Riau.

Situasi ini menjadi indikasi bahwa peredaran narkoba di Kota Padang sudah memasuki fase darurat, di mana penyebaran tidak hanya terbatas pada kelompok sosial tertentu, tetapi telah menyasar seluruh lapisan masyarakat. Selain pengguna dan kurir dari kalangan sipil, dalam beberapa kasus bahkan ditemukan keterlibatan oknum aparat dan pegawai negeri yang menunjukkan kerentanan sistemik terhadap godaan ekonomi dari jaringan narkoba (LKKI, 2023: 24). Oleh karena itu, pemetaan data dan fakta ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), guna merumuskan strategi penanggulangan yang tepat sasaran. Tanpa intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan, Kota Padang berisiko menjadi pusat peredaran narkoba baru di wilayah Sumatera Barat.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kasus Narkoba di Padang**

Meningkatnya kasus narkoba di Kota Padang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor struktural dan kultural yang saling memengaruhi. Salah satu faktor utama adalah masuknya jaringan peredaran narkoba dari luar provinsi, terutama dari wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau. Ketiga wilayah tersebut diketahui sebagai jalur utama masuknya narkoba ke Indonesia dari luar negeri, seperti Malaysia dan Thailand. Dari sana, narkoba didistribusikan melalui jalur darat ke wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang (LKKI, 2023: 17). Fenomena ini diperkuat dengan seringnya aparat menemukan pelaku yang berasal dari luar daerah dan membawa barang bukti dalam jumlah besar.

Padang memiliki posisi geografis yang strategis dengan akses terbuka melalui pelabuhan Teluk Bayur, terminal antarprovinsi, serta jalur lintas barat Sumatera yang

menghubungkan kota ini dengan provinsi-provinsi tetangga. Namun sayangnya, pengawasan di titik-titik masuk tersebut masih tergolong lemah. Menurut temuan Lembaga Kajian Kriminologi Indonesia, fasilitas pemindaian barang di pelabuhan dan terminal belum sepenuhnya didukung dengan teknologi mutakhir, dan jumlah personel pengamanan dinilai tidak memadai untuk volume arus logistik yang tinggi (LKKI, 2023: 19). Kelemahan ini membuka peluang bagi para penyelundup untuk memasukkan narkoba secara tersembunyi melalui kendaraan umum, kargo, atau jalur laut.

Rendahnya edukasi tentang bahaya narkoba dan lemahnya peran keluarga dalam pengawasan anak-anak turut memperburuk situasi. Di sejumlah kasus yang ditangani oleh BNNP Sumatera Barat, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna narkoba di Padang tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi hukum, kesehatan, dan sosial dari penyalahgunaan narkoba (BNNP Sumbar, 2023: 11). Hal ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar keluarga di wilayah perkotaan memiliki pola interaksi yang renggang akibat kesibukan kerja atau kondisi ekonomi, sehingga remaja seringkali mencari pelarian di luar rumah, termasuk melalui pergaulan bebas yang membuka akses pada narkoba. Selain itu, tingkat stres sosial dan ekonomi yang tinggi di kalangan pemuda perkotaan juga menjadi faktor signifikan yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Data dari Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka usia 15–30 tahun meningkat pascapandemi, terutama di sektor informal (Dinsos Padang, 2023: 5). Tekanan hidup yang tinggi, kurangnya lapangan kerja, serta minimnya ruang aktualisasi diri membuat sebagian pemuda merasa frustrasi dan mencari “pelarian” dalam bentuk penggunaan zat adiktif sebagai bentuk pelampiasan. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini menciptakan ruang bagi narkoba untuk tumbuh subur di lingkungan masyarakat yang kehilangan orientasi dan kontrol sosial.

Narkoba dijadikan alat untuk "menenangkan diri" dari tekanan hidup, atau bahkan sebagai strategi bertahan dalam aktivitas tertentu seperti bekerja lembur, begadang, atau beraktivitas di malam hari. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya mencoba karena diajak teman, lalu menjadi kecanduan akibat kurangnya pendampingan psikososial (BNN, 2023: 22). Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan sekadar masalah kriminalitas, melainkan juga masalah kesehatan mental dan kesejahteraan sosial yang belum teratasi secara sistemik.

Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan membentuk siklus yang sulit diputus. Masuknya jaringan luar provinsi yang didukung oleh lemahnya sistem pengawasan menciptakan suplai narkoba yang stabil. Sementara itu, minimnya pendidikan, lemahnya kontrol keluarga, dan tingginya tekanan hidup menciptakan permintaan (*demand*) yang tinggi di kalangan masyarakat, khususnya pemuda. Kombinasi ini mempercepat proses normalisasi penggunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba di Kota Padang harus mempertimbangkan faktor penyebab struktural ini secara menyeluruh. Intervensi tidak cukup dilakukan dari sisi penegakan hukum saja, melainkan juga memerlukan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang melibatkan keluarga, sekolah, institusi keagamaan, dan komunitas lokal secara aktif.

### C. Dampak Sosial dan Ekonomi

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Kota Padang membawa dampak yang kompleks, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak paling serius adalah kerusakan moral generasi muda. Berdasarkan data dari BNNP Sumatera Barat, sebagian besar pengguna narkoba di Padang adalah pemuda usia 17–30 tahun yang seharusnya berada dalam masa produktif untuk menempuh pendidikan atau bekerja (BNNP Sumbar, 2023: 9). Ketergantungan terhadap zat adiktif seperti sabu dan ganja menyebabkan penurunan nilai moral, hilangnya semangat belajar, dan kecenderungan melakukan perilaku menyimpang. Dalam banyak kasus, pengguna muda cenderung terisolasi dari lingkungan sosial dan mengalami degradasi karakter yang berdampak jangka panjang pada kualitas generasi mendatang.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah beban ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kota Padang harus mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional penanggulangan narkoba, mulai dari program pencegahan di sekolah, pengadaan fasilitas rehabilitasi, hingga biaya operasional aparat keamanan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengguna narkoba juga berdampak pada sistem kesehatan dan pelayanan sosial yang semakin terbebani (Pemko Padang, 2023: 11). Setiap tahunnya, ratusan juta rupiah dianggarkan untuk kegiatan rehabilitasi dan konseling yang idealnya dapat digunakan untuk

sektor pembangunan lainnya. Ketika sumber daya publik tersedot untuk mengatasi dampak narkoba, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pun terhambat.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat secara umum juga merasakan penurunan produktivitas dan kualitas hidup sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba. Individu yang terjerat narkoba cenderung mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, serta kehilangan kemampuan untuk bekerja secara optimal. Studi dari Lembaga Kajian Kriminologi Indonesia menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap narkoba menurunkan kapasitas kerja rata-rata sebesar 30-40% dan berdampak pada penurunan pendapatan keluarga (LKKI, 2023: 26). Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana ketergantungan pada narkoba memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba di generasi berikutnya.

Penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas di Kota Padang. Data dari Polresta Padang mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, sekitar 18% dari kasus kriminal yang ditangani berkaitan langsung dengan narkoba, baik dalam bentuk pencurian, penganiayaan, penipuan, maupun kekerasan dalam rumah tangga ( Polresta Padang, 2023: 6). Dalam banyak kasus, pengguna narkoba melakukan tindak kriminal sebagai cara untuk mendapatkan uang guna membeli barang haram tersebut. Bahkan, tidak sedikit kasus kekerasan dan perampokan yang bermula dari motif ekonomi akibat kecanduan narkoba. Keadaan ini tentu mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Fenomena kriminalitas yang berakar dari narkoba tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Ketika angka kejahatan meningkat dan pelakunya sering kali berasal dari lingkungan sekitar, maka terjadi disintegrasi sosial yang mengikis rasa aman dan solidaritas antarkomunitas (Nasution, 2019: 127). Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat proses pembangunan sosial yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat.

Dampak narkoba tidak berhenti pada individu pengguna saja, melainkan menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Baik dalam bentuk penurunan kualitas sumber daya manusia, beban fiskal negara, hingga terganggunya kohesi sosial, semuanya merupakan bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung oleh Kota Padang jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius dan terpadu.

#### D. Upaya Penegakan Hukum oleh Aparat

Dalam menghadapi lonjakan kasus narkoba di Kota Padang, aparat penegak hukum memainkan peran sentral, khususnya BNN Provinsi Sumatera Barat dan Polresta Padang. Kedua institusi ini intensif melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, baik pada level pengguna maupun pengedar. BNN Sumbar misalnya, secara berkala melakukan operasi bersama dengan kepolisian untuk mengamankan tersangka dan barang bukti, serta mengembangkan informasi untuk mengungkap jaringan yang lebih besar (BNNP Sumbar, 2023: 13).

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang diungkap. Pada tahun 2022, Polresta Padang mencatat setidaknya 472 kasus narkoba dengan 601 tersangka, naik dari 397 kasus pada tahun sebelumnya (Polresta Padang, 2023: 7). Operasi besar juga sempat dilakukan pada awal tahun 2023 yang berhasil membongkar jaringan peredaran sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui jalur darat dari Riau ke Sumatera Barat, dengan barang bukti mencapai lebih dari 3 kg sabu siap edar (Humas Polda Sumbar, 2023: 4). Namun, upaya membongkar jaringan besar pengedar narkoba tidak selalu berjalan mulus. Aparat kerap menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran operasional, teknologi pengawasan yang belum memadai, serta perlawanan dari jaringan yang sudah mengakar dan menggunakan sistem terselubung. Banyak pengedar yang hanya berperan sebagai kurir atau kaki tangan, sementara bandar besar berada di luar jangkauan hukum karena perlindungan jaringan atau berpindah-pindah wilayah (LKKI, 2023: 28).

Permasalahan lain yang mengemuka adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang. Lapas Kelas IIB Padang mencatat bahwa lebih dari 60% penghuninya adalah narapidana kasus narkoba, sebagian besar merupakan pengguna yang divonis penjara tanpa rehabilitasi (Dirjen PAS, 2023: 15). Kondisi ini menimbulkan beban operasional dan berdampak pada kurang efektifnya proses pembinaan.

Hukuman penjara belum memberi efek jera, khususnya bagi pengguna dan pengedar level bawah. Banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan serupa setelah keluar dari lapas, bahkan ada yang tetap mengendalikan jaringan peredaran dari balik jeruji besi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa disertai pendekatan rehabilitatif dan preventif tidak cukup untuk menghentikan siklus peredaran narkoba (Nasution, 2020: 89).

### E. Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi

Sadar bahwa penindakan saja tidak cukup, berbagai pihak di Kota Padang juga mulai mengembangkan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. BNN Sumbar dan Dinas Pendidikan Provinsi telah menjalin kerja sama untuk menyelenggarakan program sosialisasi anti-narkoba di sekolah dan kampus, baik melalui seminar, pelatihan guru, maupun penyisipan materi narkotika dalam kurikulum muatan lokal (Dinas Pendidikan Sumbar, 2023: 21). Upaya ini bertujuan membentuk ketahanan mental sejak usia dini terhadap bahaya narkoba.

Peran tokoh masyarakat, alim ulama, dan ninik mamak juga sangat penting dalam konteks lokal Minangkabau. Dalam banyak kesempatan, para pemuka adat dan agama ikut memberikan ceramah atau fatwa moral yang menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Forum Nagari Anti-Narkoba (FORKAN) yang digagas di beberapa kelurahan menjadi bentuk sinergi antara struktur sosial tradisional dan program pemerintah (FORKAN, 2022: 5).

Selain itu, Kota Padang telah memiliki beberapa pusat layanan rehabilitasi dan konseling, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Salah satunya adalah UPTD Rehabilitasi Napza di bawah Dinas Sosial Provinsi, yang menyediakan layanan rawat inap dan jalan untuk pecandu ringan hingga sedang. Namun, efektivitas layanan ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas dan SDM. Dalam setahun, layanan rehabilitasi hanya mampu menangani sekitar 200 klien, jauh di bawah jumlah pengguna aktif (Dinsos Sumbar, 2023: 10).

Salah satu inovasi lokal yang patut diapresiasi adalah gerakan anti-narkoba berbasis nagari/kelurahan. Di beberapa nagari di Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo, dibentuk "Posko Nagari Bersinar (Bersih dari Narkoba)" yang melibatkan pemuda setempat, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan untuk memantau peredaran narkoba di lingkungannya secara langsung (Pemko Padang, 2023: 18). Gerakan ini terbukti efektif menekan penyebaran narkoba dengan pendekatan kultural dan pengawasan partisipatif.

Meskipun belum sempurna, kombinasi antara penegakan hukum, pendidikan, penguatan sosial budaya, dan rehabilitasi menunjukkan arah kebijakan yang lebih

komprehensif. Kota Padang memiliki peluang untuk menjadi model pencegahan narkoba yang berbasis pada kearifan lokal dan kolaborasi lintas sektor.

## KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Padang semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari sisi sebaran usia dan wilayah. Kota yang menjadi pusat pendidikan dan pemerintahan di Sumatera Barat ini telah menjadi salah satu titik rawan peredaran narkoba, dengan keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Hal ini menjadi alarm keras bahwa ancaman narkoba tidak lagi bersifat laten, melainkan nyata dan langsung menyasar kehidupan masyarakat perkotaan.

Upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat seperti BNN dan kepolisian memang telah menunjukkan hasil, namun masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, kendala membongkar jaringan besar, hingga masalah overkapasitas lapas. Oleh karena itu, langkah penanganan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif semata, melainkan harus disertai pendekatan pencegahan dan rehabilitasi yang menyentuh akar masalah. Edukasi dini, penguatan peran keluarga, dan pelibatan tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi jangka panjang.

Penanggulangan narkoba di Kota Padang memerlukan keterlibatan semua pihak. Bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat luas. Tanpa sinergi dan kesadaran kolektif, upaya membebaskan kota ini dari jeratan narkoba akan sulit tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan agar Kota Padang tidak kehilangan arah dan masa depan generasi mudanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Laporan Tahunan BNNP Sumbar Tahun 2023*. Padang: BNNP Sumatera Barat.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Statistik Kapasitas dan Kepadatan Lapas di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba: Capaian dan Tantangan*. Padang: Dinas Sosial Sumbar.
- FORKAN (Forum Nagari Anti-Narkoba). (2022). *Laporan Tahunan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nagari*. Padang: FORKAN Sumbar.

- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Nasution, H. (2020). *Kriminologi dan Perilaku Menyimpang di Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kota Padang. (2023). *Inovasi Nagari Bersinar dalam Pencegahan Narkoba di Kota Padang*. Padang: Bappeda Kota Padang.
- Polresta Padang. (2023). *Laporan Kriminalitas Terkait Narkoba Tahun 2023*. Padang: Humas Polresta Padang.
- Prayitno, R., Faniyah, I., & Rosmelly, W. (2020). THE CRIMINAL APPLICATION OF THE CRIMINAL ACTION OF THIEVES WITH COLLECTIVE APPLICATION: Studi Perbandingan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(1), 9-23. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.88>
- Puslitbang Hukum dan HAM. (2021). *Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Kemenkumham.
- Yayasan Sativa Nusantara. (2021). *Peta Jalan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jakarta: YSN.
- Zuwanda, R. ., & Prayitno, R. . (2022). PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PN PDP. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(2), 253-259. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i2.978>